

Pengaruh Indeks Ketahanan Pangan, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 provinsi di Pulau Sumatera

Litta Rizki Ardiningrum*; Junaidi; Etik Umiyati

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

E-mail korespondensi : littarizki@gmail.com

Abstract

This study aims to: 1) analyze trends in the HDI, Food Security Index, Government Spending in Education and Health between Provinces on the island of Sumatra. 2) analyze the influence of the Food Security Index, Government Expenditure in Education and Health on the Human Development Index on the island of Sumatra. This study uses secondary data available from the Food Security Agency and the Central Statistics Agency in 2014-2018. The method used is descriptive and quantitative methods using panel data analysis tools. This study found that: 1) the development of HDI in 10 Provinces of Sumatra increased each year but tended to be slow, the development of government spending in education and health in 10 Provinces of Sumatra fluctuated each year but was still in the minimum provisions of the regional budget, and the Index Food Security in 10 Provinces in Sumatra also experienced fluctuating developments. 2) the variable Food Security, Government Spending in the field of Education and Health partially and simultaneously has a significant positive effect on the Food Security Index.

Keywords: *HDI, Food Security Index, Government Spending in Education, Government Spending in Health*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis perkembangan IPM, Indeks Ketahanan Pangan, Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kesehatan antar Provinsi di Pulau Sumatera. 2) menganalisis pengaruh Indeks Ketahanan Pangan, Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan terhadap IPM di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang tersedia pada Badan Ketahanan Pangan dan BPS pada tahun 2014-2018. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan alat analisis data panel. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) perkembangan IPM di 10 Provinsi di Pulau Sumatera setiap tahunnya meningkat namun cenderung lambat, perkembangan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera berfluktuasi setiap tahunnya namun masih dalam ketetapan minimal anggaran daerah, dan Indeks Ketahanan Pangan di 10 Provinsi di Sumatera juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. 2) variabel Indeks Ketahanan Pangan, Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kesehatan secara parsial dan simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM.

Kata Kunci: IPM, Indeks Ketahanan Pangan, Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas dan produktif sehingga memberikan efek multiplier tinggi terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator pengukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Faktor yang menentukan indeks pembangunan manusia kini berpatok pada 3 dimensi: lamanya hidup (longevity) yang diukur berdasarkan Angka Harapan Hidup, Pengetahuan yang dihitung berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan yang terakhir adalah standar hidup yang layak yang dihitung berdasarkan pendapatan nasional bruto perkapita. Dalam penelitian ini akan difokuskan hanya dimensi “lama hidup” dan dimensi “pengetahuan”.

Pada tahun 2018, IPM Indonesia mencapai 71,39 meningkat sebesar 0,58 dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga bagi Indonesia berstatus pembangunan manusia “tinggi”. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,20 tahun yang berarti bahwa bayi yang baru lahir diperkirakan akan dapat bertahan hidup hingga usia 71,20 tahun. Penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,17 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas VIII, sedangkan penduduk berusia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 12,91 tahun atau setara dengan Diploma I. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp11.059.000,00 (diseragamkan) per kapita per tahun. Nilai IPM Indonesia untuk 2018 menempatkan Indonesia di peringkat 111 dari 189 negara.

Negara dalam meningkatkan pembangunan manusia nya wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani masyarakat di semua bidang pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Komitmen pemerintah dalam membangun kesejahteraan dan kualitas masyarakat tercerminkan melalui alokasi anggaran belanja dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Bank dunia (world bank) melansirkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih rendah, meski perluasan akses pendidikan terus meningkat secara signifikan. Hal itu tercermin dari Indonesia yang menempati posisi 108. Hal itu terbilang cukup tertinggal dibandingkan Negara tetangga Thailand di posisi 89 dan Malaysia di posisi 62. Selain permasalahan kurikulum adopsi di setiap pergantian menteri, faktor lain yang menyebabkan masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah kurangnya tenaga pendidik terutama di tingkat SD dan SMP, terlebih di area terpencil. Direktur pembinaan guru pendidikan dasar KEMENDIKBUD, Pratono mengatakan Indonesia secara spesifik kekurangan tenaga guru sebesar 735.000 personil, banyak di antaranya di daerah terpencil (BBC.com, 2019)

Di bidang kesehatan dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 171. Alokasi anggaran di bidang kesehatan adalah mutlak terpenuhi (Mandatory Spending), bahwa pemerintah mengalokasikan anggarannya sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBN.

Jumlah dan kondisi puskesmas saat ini ada 9.799, persebarannya tidak seimbang dengan jumlah dokter umum dan pertambahan dokter yaitu sekitar 5.000 orang per tahun menyebabkan BPJS belum dapat mengandalkan seluruh puskesmas tersebut sebagai ujung tombak pelayanan. Dokter umum yang ditempatkan pada garda terdepan pelayanan kesehatan masih dibayar lebih rendah dari kepatasan dan beban kerja, serta tidak mempunyai kepastian pendapatan. Model pembayaran kapitasi yang besarnya

kurang layak menjadikan dokter (terutama yang bukan PNS) berada dalam kekhawatiran beban finansial yang cukup mengganggu. Hal ini secara tidak langsung berpotensi menyebabkan berkurangnya kualitas pelayanan yang dapat merugikan pasien. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan baik kesehatan masyarakat maupun kesehatan perorangan (kedokteran) hanyalah memiliki kontribusi 15% dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk.

Ahli gizi IPB Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan (2018) menyatakan pola makan merupakan key factor terhadap angka harapan hidup, yang mana dapat disimpulkan secara tak langsung gizi atau kecukupan akan pangan berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Hal ini pun di gizi dalam definisi pangan menurut WHO (2020) dimana gizi adalah fondasi bagi kesehatan, pendidikan dan pembangunan manusia. Gizi atau pangan yang tercukupi dapat meningkatkan immune (kekebalan tubuh) dan memiliki kemungkinan kecil terindikasi penyakit. Seorang anak dengan asupan gizi yang tercukupi mampu belajar dengan baik dan bagi tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas yang mana dalam jangka panjang efeknya mampu memutuskan siklus kemiskinan dan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas hidup. Jadi dapat kita simpulkan sudah menjadi tugas wajib pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan asupan gizi seimbang sejak masa kehamilan adalah kunci untuk mengurangi gizi buruk. Respon pemerintah seharusnya bukan hanya memberikan subsidi sembako, akses terhadap fasilitas kesehatan seharusnya dipermudah karena gizi buruk bukanlah masalah yang terjadi secara mendadak, melainkan disebabkan oleh rendahnya ketahanan pangan.

Ketahanan pangan Pulau Sumatera masih tertinggal. Berdasarkan data riset kesehatan dasar (2018), prevalensi gizi buruk balita di Indonesia berada di angka 30,8% hal ini masih di bawah standar minimum WHO yakni 20%. Padahal industri yang mendominasi provinsi di pulau Sumatera adalah agrikultura. Namun berdasarkan artikel tirto.id (2016) Bengkulu merupakan satu dari tiga provinsi dengan tingkat gizi buruk terburuk sebesar 8,7% dan Kepulauan Riau menempati peringkat 16 dengan nilai 3,7%. Dan untuk pulau Sumatera sendiri di tiap provinsi nya selalu terjadi minimal satu kali setahun kasus anak meninggal akibat kekurangan gizi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Ketahanan Pangan, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera” dari latar belakang di atas maka permasalahan yang ingin dituntaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perkembangan Ketahanan Pangan, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera pada tahun 2014-2018 (2) Bagaimana pengaruh Ketahanan Pangan, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera pada tahun 2014-2018. Dan yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menganalisis perkembangan Ketahanan Pangan (food security), Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia antar Provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada tahun 2014-2018. (2) Menganalisis Bagaimana pengaruh Ketahanan pangan, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera pada tahun 2014-2018.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Panel (gabungan *time series* dan *cross section*) dalam bentuk tahunan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Data di peroleh dari website Badan Ketahanan Pangan dan website Badan pusat Statistik.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk melihat pengaruh variabel dependen terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Metode Deskriptif digunakan untuk mengetahui perkembangan masing-masing variabel dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{P_{rt} - P_{rt-1}}{P_{rt-1}} \times 100\%$$

Dimana :

R = Laju perkembangan (dalam bentuk %)

P_{rt} = Perkembangan di tahun tertentu

P_{rt-1} = Perkembangan di tahun sebelumnya

Alat analisis data

Berdasarkan hasil pengujian Chow dan Hausman yang telah dilakukan maka diperoleh hasil estimasi terbaik yaitu metode Random Effect Model untuk menganalisis Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan hasil Estimasi dengan menggunakan Random Model Effect dengan bantuan aplikasi Eviews 11 maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$IPMit = a + \beta 1 IKPit + \beta 2 PPPit + \beta 3 PPKit + eit$$

Dimana :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

PPK = Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan

PPP = Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan

IKP = Indeks Ketahanan Pangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS DESKRIPTIF

Analisis Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi Lampung menempati peringkat terendah dibandingkan provinsi lainnya dengan nilai IPM pada tahun 2018 sebesar 69.02%, namun perkembangannya terus mengalami peningkatan. Diikuti dengan Provinsi Sumatera Selatan di peringkat 9 dengan nilai IPM sebesar 69.39%, padahal Sumatera Selatan menempati peringkat ke-5 provinsi terkaya di Indonesia. Hal itu disebabkan tidak meratanya peningkatan 3 aspek esensial Indeks Pembangunan Manusia, dalam artian ketimpangan antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan masih tinggi.

Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat ke-1 dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74.84% di mana setiap tahunnya meningkat sekitar 0.40%, menempatkan Kepulauan Riau di peringkat 4 tertinggi di Indonesia. Hal ini menjadi bukti kerja nyata pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, ditambah Batam ibu kota Kepulauan Riau mendapatkan akses mudah di Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Disusul oleh Provinsi Riau di peringkat ke-2 (72.44%) dengan nilai perkembangan sebesar 0.59%, Sumatera Barat di peringkat ke-3 (71.73%) dengan nilai perkembangan 0,51%, diikuti oleh Aceh (4) nilai IPM 68.87% dengan nilai perkembangan 0.60%, Sumatera Utara (5) 68.81% dengan nilai perkembangan 0.51%, Jambi (6) 68.24% dengan nilai perkembangan 0.37%, Bangka Belitung (7), dan Bengkulu (8).

Analisis Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Provinsi di Pulau Sumatera

Perkembangan alokasi anggaran untuk kesehatan berfluktuasi, hal itu disebabkan oleh defisit BPJS yang dimulai pada tahun 2014 sebesar 1,9 triliun dan defisit terparah terjadi pada tahun 2015 sebesar 9,3 triliun. pemerintah pun turun tangan menyuntikkan dana sebesar Rp 5 triliun. Hal tersebut dilakukan agar BPJS kesehatan tetap dapat menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dan pada tahun 2016, pertama kalinya dalam sejarah anggaran bidang kesehatan sesuai dengan amanat undang-undang yaitu 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sebesar Rp 106,1 triliun. Naik signifikan sebesar 43%.

Analisis Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi Bangka Belitung mendapat peringkat terendah di 10 provinsi Pulau Sumatera dalam anggaran pendidikan sebesar 2 triliun dengan peningkatan stagnan, dimana rata-rata nilai perkembangan setiap tahunnya sebesar 0,36%. Namun pemerintah Bangka Belitung mengklaim anggaran pendidikan di atas 20% yaitu sebesar 24,7% dari APBD Bangka Belitung. Selain itu, terdapat 2 provinsi dengan perkembangan anggaran yang stagnan yaitu Bengkulu (rata-rata APBD sebesar 3 triliun) dengan nilai perkembangan sebesar 0,37% dan Jambi (rata-rata APBD sebesar 3,5 triliun) sebesar 0,20% namun masih dalam persentase minimal anggaran yang ditetapkan kementerian keuangan.

Terdapat 4 provinsi yang termasuk dalam kategori meningkat secara signifikan. Sumatera Utara mendapat peringkat ketiga pada awal tahun 2014 hingga 2015 dengan nilai anggaran sebesar 8,6 triliun rupiah, pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai perkembangan sebesar 10% dari anggaran awal tahun 2014. Aceh menempati peringkat pertama anggaran tertinggi hal itu disebabkan salah satu faktornya adalah Aceh sebagai daerah otonom, dimana awalnya perkembangannya stagnan di tiga tahun pertama dengan rata-rata anggaran sebesar 12,5 triliun dan meningkat secara signifikan menjadi 15 triliun rupiah dengan nilai perkembangan sebesar 14% di tahun 2018. Diikuti oleh Lampung dan Sumatera Utara namun nominal anggaran dua kali lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh.

Sumatera Selatan selalu menjadi pusat perhatian dalam hal perkembangan anggaran setiap tahunnya. Sumatera Selatan telah menjadi tuan rumah sea games pada tahun 2011 dan Asian games pada tahun 2018, namun tingkat ketimpangan masyarakat masih cukup signifikan. Hal itu terlihat dalam realisasi anggaran Sumatera Selatan selalu masuk dalam kategori menengah kebawah. Perkembangan APBD di bidang

pendidikan Sumatera Selatan mengalami fluktuasi dan pada tahun 2018 mengalami penurunan membuat Sumatera Selatan mendapat peringkat rendah dibandingkan Lampung dan Riau.

Analisis Perkembangan Ketahanan Pangan Provinsi di Pulau Sumatera

Pada tahun 2016 hingga 2017 terjadi stagnan dalam tren Indeks Ketahanan Pangan di 10 provinsi Pulau Sumatera, dimana faktor penyebab nya adalah kasus gagal panen yang bermula pada maret 2016, menyebabkan harga cabai meningkat sebesar 400% atau seharga 50 ribu rupiah sekilonya.

4 provinsi mendapat kategori ketahanan pangan tinggi pada tahun 2018, yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Dengan rata-rata indeks ketahanan pangan sebesar 70%, dan sisanya masih dalam status menengah kebawah dengan rata-rata indeks ketahanan pangan sebesar 65%.

Pengujian Statistik

Uji t parsial

Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-hitung dengan t-tabel pada tingkat signifikan (α) sebesar 5%. Adapun pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk variabel Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan nilai t-hitung = 2.896731 dan nilai t-tabel = 1.67793, sehingga t-hitung > t-tabel maka H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk variabel Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan nilai t-hitung = 2.650786 dan nilai t-tabel = 1.67793, sehingga t-hitung > t-tabel maka H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk variabel Indeks Ketahanan Pangan nilai t-hitung 8.569084 dan nilai t-tabel = 1.67793, sehingga t-hitung > t-tabel maka H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya Indeks Ketahanan Pangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Uji F

Diperoleh nilai F-hitung sebesar 74.65052 dengan alpha (α) sebesar 5% dan nilai F-tabel ($\alpha = 0,05$; n1= k-1 atau $\alpha = 0,05$; 3-1; 50-3= 47) sebesar 3.20, karena nilai F-hitung > F-tabel maka H₁ diterima sehingga Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan, dan Indeks Ketahanan Pangan secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Uji R²

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berdasarkan Tabel 5.7 diperoleh hasil estimasi dengan Random Effect Model yang menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi (R-squared) adalah sebesar 0.829599 atau sebesar 83%. Artinya besarnya Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan (PPK), Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan (PPP), dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) mampu menjelaskan 83 persen terhadap Indeks Pembangunan Manusia. dan 17 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan terhadap IPM

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berdasarkan Tabel 5.7 diperoleh hasil estimasi dengan Random Effect Model yang menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi (R-squared) adalah sebesar 0.829599 atau sebesar 83%. Artinya besarnya Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan (PPK), Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan (PPP), dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) mampu menjelaskan 83 persen terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dan 17 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel model.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan Terhadap IPM

Berdasarkan hasil estimasi terlihat koefisien regresi untuk variabel Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan (PPP) positif sebesar 0.011943 persen. Artinya apabila Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan naik sebesar 1 milyar rupiah maka IPM akan meningkat sebesar 0.011943 persen dengan asumsi ceteris paribus dan sebaliknya. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 2.650786 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1.67793 dengan signifikansi prob. Sebesar 0.011 dengan demikian, Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Ini membuktikan bahwa alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Astri (2013) yang menyatakan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pendidikan maka akan diikuti oleh perubahan IPM. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014: 41).

Pengaruh Indeks Ketahanan Pangan terhadap IPM

Berdasarkan hasil estimasi terlihat koefisien regresi untuk variabel Pengeluaran Indeks Ketahanan Pangan positif sebesar 0.091879 persen. Artinya apabila Indeks Ketahanan Pangan naik sebesar 1 persen maka IPM akan meningkat sebesar 0.091879 persen dengan asumsi ceteris paribus dan sebaliknya. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Pangan memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 8.569084 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1.67793 dengan signifikansi prob. Sebesar 0.0000. dengan demikian, Pengeluaran Indeks Ketahanan Pangan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM.

Hal ini diperkuat dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG) 2006-2010, dimana dijabarkan bahwa ketidakmampuan memenuhi pangan terutama pada ibu hamil dan anak balita akan berakibat pada kekurangan gizi yang berdampak pada lahirnya generasi muda yang tidak berkualitas. Dalam jangka pendek Indonesia akan

sulit meningkatkan IPM, dan dalam jangka panjang akan terjadi “kehilangan generasi” yang dapat mengganggu kelangsungan Negara (RANPG 2006-2010).

Dalam penelitian Peter Timmer (2005) mendapatkan hasil bahwa dengan menurunkan harga beras nasional mampu meningkatkan standar kualitas pekerja di Indonesia. Namun dalam penelitian Kiki Ismati (2014) diperoleh koefisien konsumsi protein sebesar -0.264, maka dari itu diharapkan pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan yang dapat memberikan hak layak bagi rakyat Indonesia agar dapat menikmati pangan yang bergizi.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera selama tahun 2014-2018 cenderung meningkat namun pertumbuhannya lambat yaitu sekitar 0.005% per tahunnya. Sisi positifnya IPM Sumatera mampu merangkak dari kategori sedang ke tinggi, hasil tersebut terlihat dari tingkat IPM Provinsi di Sumatera yang mayoritas diatas nilai 70% (Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan masih dalam kategori sedang). Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan di Pulau Sumatera selama tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, defisit yang cukup parah terjadi di tahun 2015. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan di Pulau Sumatera periode 2014-2018 menunjukkan perkembangan yang stagnan dan cenderung menurun di beberapa provinsi, namun masih di atas ketetapan minimal sebesar 20 persen dari APBD total.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap IPM di Pulau Sumatera selama tahun 2014-2018. Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap IPM di Pulau Sumatera selama tahun 2014-2018. Dan Indeks Ketahanan Pangan juga berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Pulau Sumatera selama tahun 2014-2018.

Saran

Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera harus mampu lebih mengoptimalkan kembali alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan agar mampu terdistribusi merata hingga mencakup daerah terpencil. Pemerintah juga harus mencari cara agar proses alokasi tepat sasaran, agar tidak terjadi pemangkasan anggaran hingga sampai kepada masyarakat.

Pemerintah harus lebih memperhatikan 3 aspek pangan yaitu: 1) ketersediaan (availability), 2) keterjangkauan (affordability), 3) dan stabilisasi. 3 aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan yang mana akan berdampak langsung terhadap pembangunan manusia dan mengurangi kasus malnutrisi (gizi buruk) yang terjadi di daerah terpencil dan masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi fokus penelitian baru di masa yang akan datang, terutama dalam variabel pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baltagi, Badi H., 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*, Third Edition, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.
- Bhakti, Nadia Ayu dan Istiqomah Suprpto, 2014, *Analisis Faktor-Faktor Yang*

- Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Periode 2008-2012*, Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 18, Nomor 4
- Bucher, Slavomir, 2017, *Quality of Human Resources In Europe-Measured by Selected Indicator of Human Potential*, Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, Volume 20, No 1
- Burchi, Francesco, 2012, *A Human Development and Capacity Approach to Food Security : Conceptual Framework and Informational Basis*. S. Working Paper, Februari, UNDP
- Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian and *World Food Programme (WFP)*, *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015: Versi Rangkuman*. Economics Intelligence Unit (EIU), 2018, *Global Food Security Index*
- FAO, 2018, *Food Security Indicators*
- FAO, 1992, *International Conference on Nutrition*, Rome, December
- Gani Azmat & Biman Chand Prasad. 2007, *Food Security and Human Development*. International Journal of Social Economics, Vol. 34 No.5. pp 310-219
- Melliana, Ayunanda dan Ismaini Zein, 2013, *Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Regresi Panel*. Jurnal Sains dan Semi Pomits Vol. 2, No. 2
- Nurhemi, Shinta R.I.Soekro, Guruh Suryani R, 2014 *Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan*, Working Paper No.4.
- Reddy. Amarender A, Ch Radhika rani, Timoty Cadman, Soor Naest Kumar, 2016, *Toward Sustainable Indicator of Food and Nutritional Outcomes in India*, World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, Vol. 13. No.2, 2016. Pp 128-142
- Rustariyuni, Surya Dewi, 2014, *Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode : 2004-2012*, Piramida. Vol. X. NO.1 : 45
- Setiawan, Muhammad Bhakti dan Abdul Hakim, 2013, *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*, Jurnal Ekonomika, Volume 9, Nomor 1.
- Smit Shah, 2016, *Determinant of Human Development Index : A Cross-Country Empirical Analysis*, MPRA, Paper No. 73759
- Sow. Mouhamadou. Moussa Berete, Gregory Uche, 2015. *The Relationship Between Safety, Security and Human Development in Africa*. International Researchers Volume No. 4, Issue No.2
- Yanthi, Ni Putu Dera dan I Nyoman Budiantara, 2016, *Pemodelan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline di Jawa Tengah*, Jurnal Sains dan Seni ITS, Vol. 5 NO. 2.
- UNDP, 1996, Human Development
- UNDP, 2016, Human Development Report
- Verbeek, M. 2004. A Guide to Modern Econometrics. Second Edition. Suhardjo. 1996. *Pengertian dan Kerangka Pikir Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Makalah disampaikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah tangga*. Yogyakarta, 26-30 Mei.
- Widarjono. Agus . 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia. Yogyakarta

- Verwimp, Philip, 2012, *Food Security, Violent Conflict and Human Development : Causes and Consequences*. Working Paper. No.016 World Food Summit, 13-17 November 1996, Rome, Italy
- Yanthi, Ni Putu Dera dan I Nyoman Budiantara, 2016, *Pemodelan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline di Jawa Tengah*, Jurnal Sains dan Seni ITS, Vol. 5 No. 2.